



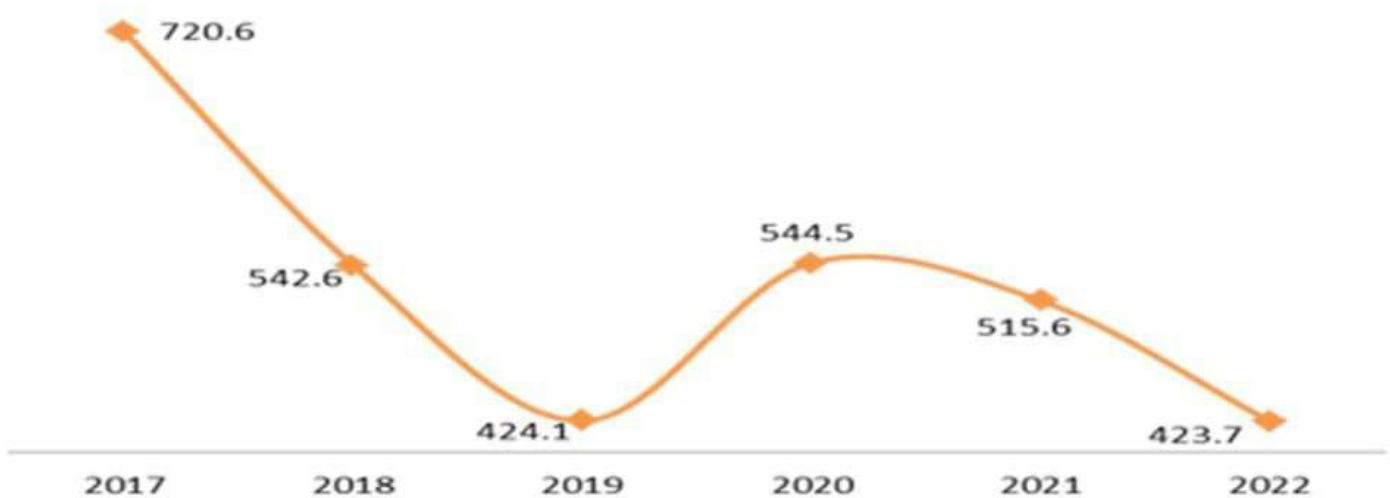
Mencermati Anggaran Belanja Bakamla RI





Anggaran Belanja Bakamla RI Periode 2017-2022

Turun Tajam



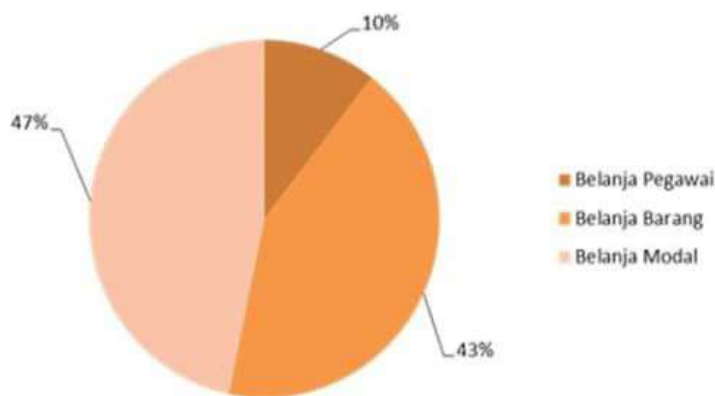
Sumber: LKPP 2017-2020 dan NK APBN 2022, diolah

Dengan tugas yang sangat besar tersebut, alokasi anggaran belanja Bakamla justru sangat terbatas (tidak pernah mencapai lebih dari Rp800 miliar) sejak 2017. Padahal ancaman di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sangat kompleks seperti: sengketa perbatasan dan Laut Natuna Utara, perompakan (*armed and robbery*) dan pembajakan (*piracy*), *Trans National Organized Crimes* (TNOC) berupa penyelundupan narkoba, BBM dan senjata, *illegal entry* dan aksi terorisme.

Perkembangan anggaran belanja Bakamla sejak 2017 menunjukkan tren penurunan hingga pada 2022. Rata-rata anggaran belanja Bakamla tumbuh minus 10,08 persen per tahun atau anjlok dari Rp720,6 miliar pada 2017 menjadi hanya Rp423 miliar pada 2022. Anggaran belanja pada 2022 justru melewati titik terendah pada 2019. Penurunan anggaran belanja Bakamla secara tidak langsung akan berdampak pada tugas-tugas teknis dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia yang luasnya mencapai tiga juta kilometer persegi.



90 Persen Anggaran Belanja Bakamla RI Untuk Belanja Barang dan Modal



Sumber: LKPP 2017-2020 dan NK APBN 2022,

Tidak seperti anggaran di beberapa Kementerian dan Lembaga lainnya, anggaran belanja Bakamla justru didominasi oleh belanja modal dan barang yang mencapai 90 persen dari total belanja Bakamla selama periode 2017-2022.

Rata-rata belanja modal mencapai Rp247 miliar (46,74 persen), lebih besar dibandingkan belanja barang sebesar Rp225,9 miliar (42,74 persen) dan belanja pegawai yang hanya Rp55,6 miliar (10,52 persen).

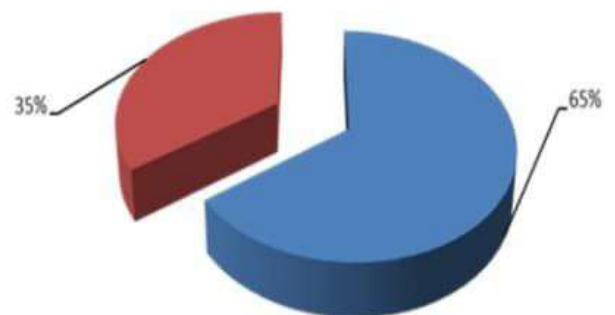




Anggaran Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut Relatif Masih Rendah

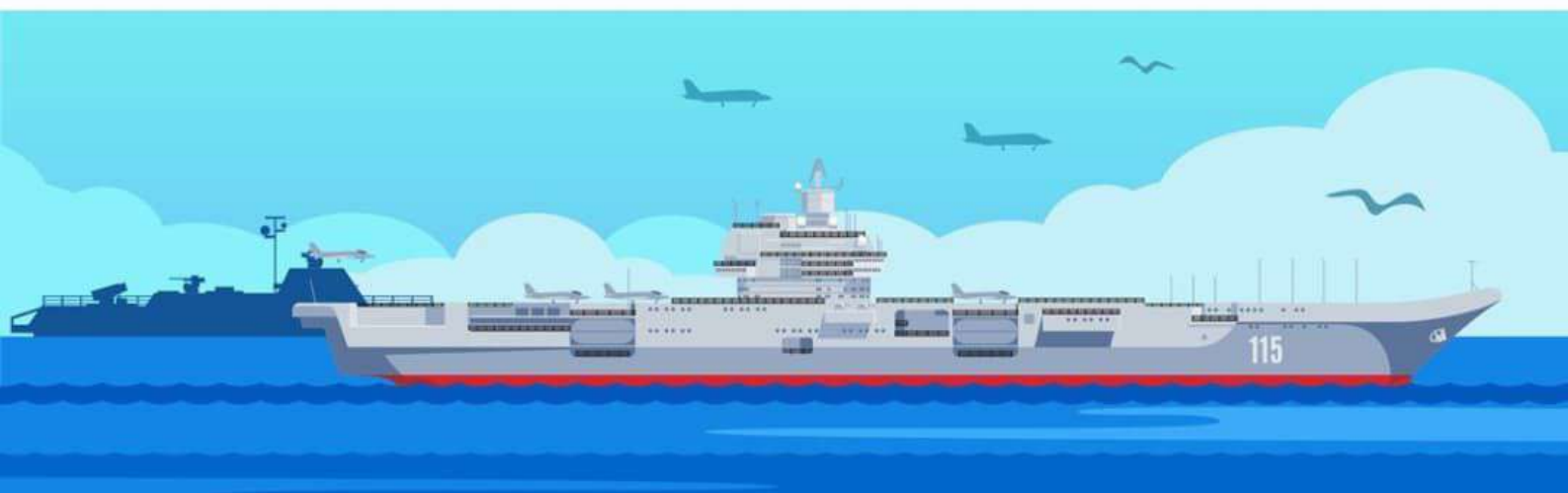
Program peningkatan keamanan laut bertujuan untuk mewujudkan eskalasi keamanan, keselamatan, penegakan hukum dan sistem informasi keamanan laut Indonesia. Sedangkan program dukungan manajemen hanya sebatas mengelola administrasi umum dan layanan perkantoran.

Berdasarkan belanja program, justru belanja untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut relatif masih lebih rendah (hanya 35 persen) atau rata-rata Rp199,9 miliar selama 2017-2022. dibandingkan dengan belanja dukungan manajemen (65 persen) atau rata-rata Rp374,6 miliar.



- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut

Sumber: LKPP 2017-2020 dan NK APBN 2022, diolah





Target Output Prioritas Menurun Tajam Pada 2021 dan 2022

No	Kegiatan/Output Prioritas	Realisasi				Target	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Operasi Laut Bersama Dalam Negeri	25	31	196	177	10	10
2	Operasi Laut Bersama Luar Negeri	4	4	4		4	
3	Operasi Udara Bersama Dalam Negeri			306	396		
4	Operasi Udara Bersama Luar Negeri			4		4	
5	Pengadaan Kapal Patroli (Unit)	2	3	3			
6	Pengadaan Alat Navigasi dan Keselamatan Kapal		2				
7	Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Kamlamla				332		2
8	Pengadaan Amunisi Penyelenggaraan Patroli Kamlamla				1		1
9	Pengadaan UAV					2	2
	Total	31	40	513	906	20	15

Sumber: Nota Keuangan APBN 2022, diolah

Seiring dengan penurunan anggaran belanja pada 2021 dan 2022, target *output* prioritas juga menurun tajam hanya menyisakan 20 dan 15 *output* saja. Jumlah tersebut sangat jauh bila dibandingkan pada 2020 yang mencapai 906 *output*. *Output* prioritas berupa operasi laut bersama dalam negeri turun menjadi 10 sedangkan operasi udara bersama dalam negeri tidak lagi menjadi target pada 2021 dan 2022. Target belanja pada 2021 dan 2022 fokus pada pengadaan *Unmanned Aerial Vehicle* sebanyak 2 *output* dan senjata dan amunisi patroli kamlamla masing-masing 1 dan 2 *output*.

